

**IMPLEMENTASI *ASEAN FRAMEWORK OF ACTION ON MARINE DEBRIS*  
TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN SAMPAH LAUT DI KAWASAN**

**ASIA TENGGARA**



**SKIRIPSI**

*DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
PADA PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL*

Oleh :

**MUH ARDHA SALIM**

**4516023038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi ASEAN Framework Of Action On Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut di kawasan Asia Tenggara.

Nama Mahasiswa : Muh. Ardha Salim

Nomor Stambuk : 4516023038

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Asy'ari, S.IP., MA.  
NIDN. 0908088806



Rosnami, S.IP., MA  
NIDN. 0930018001

Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Jurusan Hubungan  
Internasional



Dr. A. Burchahuddin, S.Sos., M.Si  
NIDN. 0905107005



Muh. Asy'ari, S.IP., MA  
NIDN. 0908088806

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Selasa Tanggal 16 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua  
Dengan Judul Skripsi **IMPLEMENTASI ASEAN FRAMEWORK OF  
ACTION ON MARINE DEBRIS TERHADAP UPAYA  
PENANGGULANGAN SAMPAH LAUT DIKAWASAN ASIA TENGGARA.**

Nama : Muh. Ardha Salim  
Nomor Stambuk : 4516023038  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

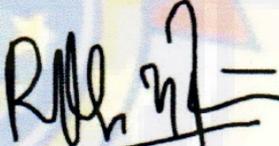
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

**Pengawas Umum:**

  
**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si**

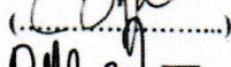
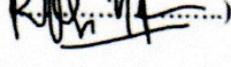
**Panitia Ujian :**

  
**Muh. Asy'ari, S.IP., MA**  
Ketua

  
**Rosnani, S.IP., MA**  
Sekretaris

**Tim Penguji :**

1. Arief Wicaksono, S.IP., MA
2. Beche BT mamma, S.IP., MA
3. Muh. Asy'ari, S.IP., MA
4. Rosnani, S.IP., MA

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Ardha Salim

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Implementasi ASEAN Framework Of Action On Marine Debris  
terhadap upaya penanggulangan sampah laut di kawasan Asia  
Tenggara.

Saya menyatakan yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli dan rujukan lain (penelitian sebelumnya dan jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 13 Agustus 2022  
Penulis



**Muh.Ardha Salim**  
**NIM.4516023038**

## ABSTRAK

**Muh. Ardha Salim, 4516023038**, Skripsi yang berjudul Implementasi ASEAN Framework of Action on Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut di kawasan Asia Tenggara di bawah bimbingan, **Muh. Asy'ari, S.IP., M.A** pembimbing I dan **Rosnani, S.IP., M.A** sebagai pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana implementasi ASEAN Framework of Action on Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut di Kawasan Asia Tenggara.

Sehubungan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan metod eksplanatif, penulis akan menjelaskan Implementasi ASEAN Framework of Action on Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut di Kawasan Asia Tenggara. Teknik Pengumpulan data yang digunakan berupa pengumpulan data premier berupa laporan-laporan dan juga terbitan Jurnal sebagai sumber Sekunder. Sumber sekunder akan diperoleh juga melalui surat kabar atau media massa elektronik / internet, serta melalui peninggalann tertulis terutama arsip-arsip termasuk juga buku – buku tentang yang berisi pendapat, teori atau hukum hukum tentang masalah pengrusakan lingkungan laut.

Hasil Penelitian terkait Implementasi ASEAN Framework of Action On Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut di Kawasan Asia Tenggara menunjukkan bahwa ASEAN telah meluncurkan Regional Action (RAP) yang dimana negara dikawasan asean memiliki aturan atau kebijakan yang dibuat secara kolaboratif dan komprehensif. RAP ini juga digunakan sebagai langkah ASEAN dan anggotanya dalam menyelesaikan permasalahan polusi lingkungan laut. Akan tetapi upayanya ini mengalami beberapa kendala yaitu disetiap negara belum memilki bentuk koordinasi yang dimana mulai dari struktur dari kelembagaan untuk mengatasi sampah laut masih belum pasti. Oleh karena itu penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN menganggap pananganan sampah plastik laut perlu diselesaikan secara Bersama. Adapun rilisnya Regional Action plan yang berjudul ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member State (2021-2025) mengindikasi bahwa ASEAN telah bekerjasama dengan negara Anggotanya untuk mengatasi polusi sampah laut.

Kata Kunci : ASEAN, Regional Action Plan, sampah laut.

## ABSTRACT

**Muh. Ardha Salim, 4516023038**, Thesis entitled Implementation of ASEAN Framework Of Action On Marine Debris on marine debris management efforts in Southeast Asia under the guidance of **Muh.Asy'ari, S.IP., MA** as supervisor I and **Rosnani, S.IP ., MA** as supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, University of Bosowa Makassar.

This study aims to determine how the implementation of ASEAN Framework of Action on Marine Debris on marine debris management efforts in the Southeast Asia Region.

In connection with the objectives to be achieved, the research method used by the author is qualitative research with an explanatory method approach. The data collection technique used is in the form of premiere data collection in the form of reports and also journal publications as secondary sources. Secondary sources will also be obtained through newspapers or electronic media / internet, as well as through written relics, especially archives, including books containing opinions, theories or legal laws regarding the problem of destroying the marine environment. The results of research related to the implementation of the ASEAN Framework of Action On Marine Debris on efforts to overcome marine debris in the Southeast Asia Region show that ASEAN has launched a Regional Action (RAP) in which countries in the ASEAN region have rules or policies that are made collaboratively and comprehensively. This RAP is also used as a step for ASEAN and its members in solving the problem of pollution of the marine environment. However, this effort has encountered several obstacles, namely that each country does not yet have a form of coordination where starting from the institutional structure to deal with marine debris is still uncertain. Therefore, this study shows that ASEAN considers the management of marine plastic waste to be solved together. The release of the Regional Action plan entitled ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member State (2021-2025) indicates that ASEAN has collaborated with its Member States to overcome this marine debris.

Keywords: ASEAN, Regional Action Plan, Marine debris.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi ALLAH Subhana Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul Implementasi ASEAN Framework Of Action On Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut di kawasan Asia Tenggara. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa, Makassar. Penulis dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini, dan kepada pihak-pihak yang telah hadir sejak awal, pertengahan, dan bahkan akhir perkuliahan penulis.:

1. Kedua orang tua, baik materil maupun spiritual, yang selalu mendukung bapak dan mama dalam segala kegiatan yang penulis geluti dan minati. Terima kasih untuk semua yang tidak bisa saya balas. dan kakak, keponakan yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
2. Bapak Asy'ari Mukrim Mukrim, S.Ip., M.A & Ibu Rosnani, S.Ip M.A. Sebagai pembimbing skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas saran dan kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berkonsultasi selama mengerjakan artikel ini.

3. Bapak Asy'ari Mukrim Mukrim, S.Ip., M.A atau yang akrab sayapanggil Pak Ari, Selaku pendamping akademik penulis yang selalu menjadi tempat memintaa saran selama di perkuliahan Prodi HI Unibos. Terima kasih atas segala nasehat-nasehat beliau yang akan selalu bermanfaat bagi penulis kedepannya.
4. Semua Bapak & Ibu Dosen, Bapak Arief Wicaksono, S.Ip., M.A., Bapak Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A., Bapak Asy'ari Mukrim, S.Ip., M.A., Ibu Rosnani, S.Ip., M.A Ibu Fivi Elvira Basri, S.Ip., M.A., Ibu Finaliyah Hasan, S.Ip., M.A Ibu Becce Bt. Mamma, S.Ip., M.A dan Ibu Ayu Kartika J.T., S.Ip., M.A. Terima kasih telah berkenan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Semua Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang membantu segala administrasi penulis.
6. Lembaga kemahasiswaan tempat saya mengabdikan dan mengembangkan diri dan mengembangkan kreatifitas, seperti HIMAHI, dan BEM FISIP.
7. Teman-teman Refolusi'16 yang diamana selalu memberikan support dan semangat sampai akhir kepenulisan.
8. Teman- teman Dandelion'16 teman kelas dan teman berproses di HIMAHI yang selalu bisa diminta dalam memberikan saran dan semangat hingga akhir semester.
9. Junior BEM FISIP dan HIMAHI Universitas Bosowa.
10. Senior dari BEM FISIP Universitas Bosowa (45) dan keluarga besar.

11. HIMAHI Universitas Bosowa yang dimana telah mengajarkan arti berproses, memberi dukungan, dan memberi bantuan hingga doa untuk menjadi mahasiswa yang bisa lulus pada waktunya.
12. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat teman SMP, yang telah memberikan semangat dan dan dukungan dari awal penulis hingga titik darah penghabisan.
13. Terima kasih kepada Zero Cafe yang telah menyediakan kopi botol susuyang enak dan tempat ternyaman dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih kepada Yura Yunita yang telah menyanyikan lagu Tenang sebagai penyemangatt dan penenang penulis selama perkuliahan dan Penulisaan skirpsi.
15. And the last, Ms. Ainun, The most meaningful woman gives unlimited enthusiasm and time in my life.

-Terima Kasih-

Penulis

Muh.Ardha Salim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	4
D. KERANGKA KONSEPTUAL .....	5
E. METODE PENELITIAN.....	10
F. RANCANGAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerjasama Internasional.....	12
B. Kebaruan Penelitian .....	14
<b>BAB III GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>16</b>
A. Gambaran Umum Sampah Laut.....	16
B. Gambaran ASEAN Framework .....	18
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Implementasi ASEAN Dalam Menjalankan Frame Work.....	23
a. Di Level Regional.....	24
b. Di Level Nasional .....	25
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>35</b>
A. KESIMPULAN.....	35
B. SARAN .....	35
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>36</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak 1950 sekitar 8,3 miliar ton sampah plastik telah dihasilkan, 60% di antaranya dibuang secara tidak sengaja, yaitu di alam dan di tempat pembuangan akhir. Pada tahun 2025 jumlah sampah yang dihasilkan diperkirakan akan mencapai berlipat ganda dari tahun sebelumnya. Di negara-negara berpenghasilan rendah, dimana sekitar 205,4 miliar dollar dihabiskan setiap tahun untuk pengelolaan sampah padat, jumlah itu akan tumbuh menjadi sekitar 37,5 miliar dollar pada 2025. Setiap tahun, 1,3 miliar ton sampah kota datang pada 2012 dari berbagai belahan dunia. Pada tahun 2025, jumlah ini akan meningkat menjadi 2,2 miliar ton pertahun (World Bank, 2012).

Pencemaran plastik di laut yang menjadi perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir ini dan merupakan tantangan mendesak, mengingathal tersebut sangat membahayakan ekosistem laut dan juga berdampak pada konteks global. *WWF* (*world wildlife fun*) telah melihat pencemaran plasatik 6 negara yakni Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam. Dimana ke-enam negara ini memberikan 60 persen dari 8 juta ton sampah plastic dilautan dunia setiap tahunnya. *WWF* telah menganalisa bahwa Malaysia merupakan negara nomor satu dengan penggunaan kemasan plastic per kapita per tahun berkisar 16,8 kilogram per orang. Dan peringkat kedua yakni Thailand 15,5 kilogram per orang setiap tahunnya. Thomas Schuldt selaku Kepala *WWF* mengatakan bahwa Malaysia menggunakan lebih banyak plastik dikarenakan mereka termasuk warga negara yang paling kaya

disbanding negara-negara yang diamati (Alfadillah, 2020).

Sampah plastik dilaut dapat berbahaya bagi lingkungan laut karena plastik dapat terurai menjadi partikel-partikel kecil yang dapat disalahartikan sebagai makanan oleh biota laut. Semakin kecil ukuran plastik, semakin sulit dibersihkan, dan dapat berdampak negatif bagi Kesehatan biota laut, bahkan manusia (Fleming, 2014).

Kondisi ini apabila tidak ditanggulangi akan menyebabkan penyebaran kontaminasi sampah plastik terhadap ikan semakin pesat. Apabila ikan yang mengkonsumsi plastik akan menyebabkan berbagai macam penyakit apabila dikonsumsi oleh manusia dan juga mengganggu kesehatan manusia dan dapat membahayakan terumbu karang sehingga tidak dapat tumbuh dan berkembangbiak dengan baik bahkan dapat menyebabkan terumbu karang mati yang dapat mengganggu ekosistem laut. ASEAN menyelenggarakan pusat acara terkait, Konferensi ASEAN tentang pengurangan sampah laut dikawasan ASEAN, yang diselenggarakan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya alam di Thailand. Pertemuan tersebut merupakan hasil 20th ASEAN Working Group Meeting on Coastal and Marine Environment. Ini bertujuan untuk menyatukan Lembaga-lembaga sectoral ASEAN yang relevan dan berbagai pemangku kepentingan termasuk; organisasi internasional, bisnis dan industry; akademisi dan pakar, masyarakat sipil dan pemuda yang terlibat dalam isu-isu seperti Kesehatan dan keamanan pangan, Sains, teknologi, inovasi dan perikanan, termasuk hukum dan kerangka peraturan untuk membahas lebih lanjut strategi ASEAN untuk memerangi sampah plastik laut secara efektif (ASEAN Sekretariat,

2019).

Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah meluncurkan rencana aksi regional untuk memerangi sampah laut di negara-negara ASEAN (2021-2025), yang telah menyediakan strategi Bersama yang berfokus pada solusi untuk mengatasi plastik laut seluruh dunia dan melangsungkan pertemuan *KTT ASEAN* tahun 2019 di Bangkok Thailand dan dihadiri oleh 10 anggota *ASEAN* hasil dari pertemuan tersebut adalah rencana aksi, ditingkat nasional dan regional, untuk mengatasi limbahsampah lautan.

Dalam rangkaian konferensi *ASEAN* di Bangkok pada tahun 2019 negara tersebut meluncurkan strategi baru dalam mengatasi sampah laut yang berjudul *ASEAN Framework of Action On Marine Debris* atau kerangka kerja atasi sampah laut sebagai langkah yang optimis dimasa depan. Dimana isi dari pertemuan tersebut mereka membuat rencana implementasi yang terdiri dari 3 point, point pertama merupakan tahapan perencanaan yaitu pengaturan kelembagaan awal, mobilisasi sumber daya dan koordinasi dan pengembangan dasar, point kedua yaitu tahapan implementasi yang berisi pengaturan kelembagaan akhir dan implementasi Tindakan, point ketiga yakni fase pemantauan, pelaporan dan evaluasi dimana mereka membuat pelaporan tahunan, tinjauan tengah semester, evaluasi akhir dan rekomendasi baru. Dalam pertemuan ini pemerintahan.

Indonesia sangat dilirik oleh negara-negara ASEAN karena Indonesia merupakan kawasan Regional terbesar di ASEAN. The National Plastic Action Partnership (NPAP) menerapkan aliran massa sampah dan analisis menggunakan data sekunder dari 514 kabupaten dan kota untuk menangkapkeragaman regional di

seluruh Indonesia dan memberikan perkiraan kebocoran sampah laut berada dalam rentang ketidakpastian dari studi yang disebutkan sebelumnya (NPAP, 2020). Oleh sebab ini, peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi ASEAN Framework Of Action On Marine Debris terhadap upaya penanggulangan sampah laut dikawasan asia tenggara.

## **B. BATASAN DAN RUMUSAN MASALAH**

### **1. Batasan masalah**

Dari hasil forum KTT ASEAN Bangkok 2019, Kawasan Indonesia merupakan wilayah laut terluas yang mendapatkan dampak terbesar dari sampah laut global, dimana di akibatkan oleh rusaknya lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia serta polusi yang diberikan. Untuk itu, penulis membatasi masalah yakni bagaimana implementasi tindak lanjut dari KTT ASEAN Framework of Action On Marine Debris.

### **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi ASEAN *Framework of Action on Marine Debris* terhadap upaya penganggulan sampah laut di Kawasan Asia Tenggara?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk Mengetahui bagaimana model kebijakan yang diambil oleh hasil Forum KTT ASEAN 2019 yang membahas tentang *ASEAN Framework of Action On Marine Debris*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Membuka cakrawala bagi peneliti hubungan internasional untuk belajar

lebih banyak dan fokus pada fenomena alam atau masalah sampah global yang melibatkan wilayah sekitarnya. Memberikan ide terkait pelanggaran lingkungan dan strategi bagaimana pemerintah regional dan regional dapat mengatasi masalah sampah global. Memberikan informasi terkait judul- judul di atas untuk digunakan generasi mendatang sebagai tolak ukur atau referensi. Menambah pustaka referensi pada Perpustakaan Program Penelitian Hubungan Internasional FISIP Universitas Bosova Makassar.

#### **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Dalam penelitian ini penulis ingin memperlihatkan kerangka konsep yang digunakan untuk membentuk landasan logika penelitian, yaitu konsep Kerjasama Internasional. Kerjasama Internasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau sebuah paksaan serta disahkan secara hukum. Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan Bersama atau sebagai usaha pemenuhan kebutuhan pribadi (Dougherty & Pfaltzgraff 1997)

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan Kerjasama dengan negara lainnya:

1. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan Bersama.
2. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain (Holsti 1995). Apabila di rangkum dari berbagai pemikiran maka Kerjasama Internasional merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk melihat kepentingan pasar dan perlindungan lingkungan hidup.

Kerjasama dapat dilihat sebagai komitmen individu untuk kebaikan bersama atau sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu. Kunci penting dari perilaku kooperatif yaitu pada sejauh mana setiap pribadi mempercayai bahwa pihak yang lainnya akan bekerjasama. Isu utama dalam kerjasama yaitu pemenuhan kepentingan pribadi dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak akan didapat melalui kerjasama daripada memenuhi kepentingan sendiri dengan cara berusaha sendiri atau berkompetisi (James E. Dougherty, dkk. 2017).

Kerjasama Internasional didorong oleh beberapa faktor salah satunya adalah kesadaran dan kemauan untuk bernegosiasi, merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kerjasama internasional dengan dasar bahwa negosiasi akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi, salah satunya adalah sampah laut global.

Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, air, pantai serta mengalir ke laut atau serasah yang berasal dari kegiatan laut. Sampah laut ditemukan di semua habitat laut, dari daerah padat penduduk hingga daerah terpencil yang belum tersentuh manusia, dari perairan pesisir dan dangkal hingga parit laut dalam. Kepadatan sampah laut bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia, kondisi air atau cuaca, struktur dan perilaku permukaan bumi, titik masuk dan sifat fisik bahan sampah.

Interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat terjadi di berbagai sektor program pengelolaan sampah untuk menemukan sorotan atau mengatasi masalah yang melibatkan publik, pemerintah, pembangunan dan pelayanan public.

Seiring pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dan melalui pengelolaan bank sampah, peran bank sampah juga harus dioptimalkan. Lokasi pembuangan sampah merupakan masalah di setiap wilayah dunia. Pertambahan jumlah sampah yang tidak dibarengi dengan perbaikan sarana dan prasarana, mengakibatkan permasalahan sampah yang tidak menentu, dimana masih banyaknya sampah yang tidak dapat dibersihkan, pembuangan sampah yang liar dan tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan daerah kotor, berbau tidak sedap, mengurangi konsumsi energi, adaptasi terhadap sungai dan parit dan berbagai dampak yang diakibatkannya.

Salah satu yang mengatur mengenai penanggulangan sampah di laut adalah World Charter for Nature 1982 (piagam 1982) isi dari piagam yang mendorong penjagaan lingkungan laut dari sampah plastik yang menyatakan bahwa semua kegiatan yang diperkirakan akan berdampak pada alam harus dikendalikan dan memaksimalkan teknologi terbaik untuk meminimalisir risiko yang signifikan terhadap alam dan dampak buruk yang lain, khususnya pada kegiatan yang cenderung menyebabkan kerusakan alam yang tidak dapat dipulihkan. Soft law yang mengatur tentang penanggulangan sampah dilaut adalah resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 2749, Resolusi tersebut menyerukan kepada Negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan peraturan, standar dan praktik internasional untuk mencegah polusi dan bahaya lain terhadap lingkungan laut, termasuk pantai, dan untuk mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah gangguan terhadap

keseimbangan ekologi lingkungan laut (World Charter for Nature 1982).

Dengan Menyusun peraturan yang telah diidentifikasi dan cukup melindungi lingkungan. Pemerintah dunia harus mengambil tindakan terhadap pencemaran lingkungan yang merugikan ekosistem dan organisme hidup, terutama pencemaran dari limbah. Pencemaran sampah terjadi tidak hanya di lingkungan laut, tetapi juga dilaut. Dampak pencemaran sampah dilaut, dll. Rusaknya ekosistem laut membuat makhluk didalm air menghadapi bahaya kepunahan (Dimas, ahmad, 2019).

Peningkatan sampah plastik dilautan dan dampak negatif yang diakibatkannya telah menyebabkan fokus global pada sampah plastik dilautan, menghasilkan perjanjian internasional bilateral, multilateral dan regional untuk mengatasi polusi sampah laut. Adapun Prinsip 22, Negara harus bekerja sama untuk mengembangkan hukum internasional untuk mengatur kewajiban dan kompensasi bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan lainnya yang disebabkan oleh kegiatan di dalam atau di luar yurisdiksi atau kendali mereka.

Selain itu, Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan dikembangkan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan tahun 1992 (juga dikenal sebagai KTT Bumi). Berdasarkan Prinsip ini negara-negara juga perlu bekerja sama untuk mengembangkan hukum internasional lebih lanjut guna mengejar dan mengkompensasi dampak merugikan dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan didalam yuridiksi suatu negara atau kendali diluar yuridikasinya. Negara-negara juga harus bekerja sama secara efektif untuk mencegah migrasi orang ke negara lain untuk kegiatan dan zat yang menyebabkan

degradasi lingkungan yang parah atau dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia. KTT ASEAN membentuk Declaration on the Decade of Coastal and Marine Environmental protection in the South China Sea (2017-2027).

Kerjasama merupakan upaya negara-negara untuk mengatasi pencemaran lingkungan laut. Pengaruh lingkungan laut terhadap perekonomian nasional. Kondisi lingkungan mendorong negara-negara ASEAN untuk melindungi ekosistem laut dan keanekaragaman hayati laut. Pernyataan tersebut berfokus pada penghapusan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), melindungi penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, mengubah sumber daya alam dan lingkungan menjadi keanekaragaman hayati dan wilayah pesisir, serta memelihara mekanisme yang ramah lingkungan. Lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan pencemaran lingkungan dari lalu lintas perbatasan. Lalu ada Undang-Undang Penelitian, Pencegahan, dan Pengurangan Sampah Laut (MDPRA).

MDPRA adalah peraturan AS terhadap pencemaran laut. Program MDPRA mengidentifikasi, mencari, menilai, mengurangi, dan mencegah pencemaran sampah laut dan dampak negatifnya terhadap lingkungan laut dan keselamatan laut. Untuk itu melalui konsep ini, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana tindakan lanjutan dari KTT ASEAN Framework of Action On Marine Debris mengenai persoalan sampah laut global yang berdampak pada ekosistem laut. Konsep ini digunakan penulis untuk dapat menemukan solusi dari hasil forum KTT ASEAN Framework of Action On Marine Debris.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yakni Kualitatif, yaitu menggambarkan tentang bagaimana kerjasama ASEAN terhadap sampah laut global.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa laporan dan publikasi jurnal sebagai sumber sekunder. Sumber sekunder berasal dari surat kabar atau media massa elektronik/internet.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Teknik penelitian dokumenter adalah metode pengumpulan data melalui warisan tertulis, terutama arsip, termasuk buku-buku tentang perspektif dan teori tentang masalah sampah laut global. Data yang dianalisis berasal dari referensi yang berkaitan erat dengan pertanyaan penelitian, seperti buku, bahan bacaan, dan internet.

### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengaitkan atau menghubungkan sumber data yang diperoleh dengan unit analisis melalui konsep atau metode yang digunakan oleh penulis.

## **F. RANCANGAN SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dilakukan dan analisis data akan disusun menjadi sebuah karya tulis ilmiah (skripsi), sistem yang dirancang sebagai berikut:

- a. Bab pertama (**I**) adalah pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, definisi masalah, pembentukan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan pembahasan sistematis.
- b. Bab II (**II**) merupakan literature review yang berisi literature dan penelusuran literature tentang peran ASEAN dalam menanggulangi pencemaran sampah laut secara global di lautan Indonesia.
- c. Bab 3 (**III**) merupakan gambaran umum dari objek penelitian, yaitu pembahasan kebijakan, sejarah, dan rancangan ASEAN dalam menangani sampah laut global di wilayah kawasan ASEAN.
- d. Bab IV (**IV**) menganalisis pembahasan hasil temuan mengenai upaya yang diajalani dalam penanganan sampah laut di kawasan ASEAN dan nasional negara kawasan Asia Tenggara.
- e. Bab Kelima (**V**), yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran mengenai objek penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerjasama Internasional**

Sejak awal, teori hubungan internasional telah berfokus pada pemeriksaan penyebab dan kondisi kerja sama. Kerja sama dapat timbul sebagai akibat dari penyesuaian perilaku oleh aktor dalam menanggapi atau mengantisipasi pilihan yang dibuat oleh aktor dalam menanggapi atau mengantisipasi pilihan yang dibuat oleh aktor lain. Kerjasama dapat terjadi selama proses negosiasi sebenarnya, atau karena kedua belah pihak saling mengenal dan negosiasi tidak lagi diperlukan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Kerjasama dapat diartikan sebagai seperangkat hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan oleh undang-undang. Kerjasama dapat berkembang dari komitmen individu untuk kepentingan bersama atau sebagai upaya untuk menjaga kepentingan individu. Kunci perilaku kooperatif adalah sejauh mana setiap orang percaya bahwa orang lain akan bekerja sama. Oleh karena itu, masalah utama dengan teori kerjasama adalah bahwa hal itu didasarkan pada realisasi kepentingan individu untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan melalui kerjasama daripada usaha sendiri atau persaingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997). Ada beberapa alasan mengapa negara bekerja sama dengan negara lain:

1. Untuk alasan peningkatan kesejahteraan ekonomi, banyak negara bekerja sama dengan negara lain untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam menghasilkan produk yang dibutuhkan rakyatnya karena keterbatasan negara.

2. Pengingat tentang efisiensi yang terkait dengan pengurangan biaya.
3. Karena ancaman terhadap keamanan bersama.
4. Untuk mengurangi kerugian negatif yang ditimbulkan oleh tindakan masing-masing negara terhadap negara lain (Holsti, 1995).

Kerja sama internasional sering kali berbentuk desentralisasi, sistem dan norma yang tidak efisien yang menargetkan entitas dengan budaya dan distribusi geografis yang berbeda, Sehingga perlu untuk memecahkan masalah informasi motivasi yang tidak mencukupi, dan tujuan semua pihak sangat penting. Interaksi yang sedang berlangsung, perkembangan pertukaran informasi dan transportasi antar negara tentang tujuan kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi, dan perkembangan berbagai mekanisme, meskipun belum sempurna diantaranya, model kerjasama menggambarkan unsur-unsur teori kerjasama berdasarkan pemahaman tentang sistem internasional. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Membahas kerjasama internasional secara teoritis mencakup hubungan antara dua negara atau antar unit yang lebih besar, yang disebut juga dengan hubungan multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk kelembagaan yang mengatur tiga atau lebih hubungan antar negara. (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997).

Perilaku kooperatif dapat terjadi dalam pengaturan kelembagaan formal dengan aturan yang disepakati, norma yang disepakati, norma yang diterima, atau prosedur pengambilan keputusan bersama. Berdasarkan teori kerjasama internasional, pembangunan politik memerlukan pemahaman dan kesepakatan. Pembangunan politik memerlukan pemahaman dan kesepakatan

sebagai dasar utama. Pembangunan politik memerlukan pemahaman dan pemahaman, sebagai struktur bagi munculnya dan perkembangan perilaku internasional. Multilateralisme oleh organisasi, institusi, dan aktor internasional menetapkan konsep masyarakat politik dan menciptakan proses integrasi yang terpadu (Dougherty&Pflatzgraff,1997.)

## **B. Kebaruan Penelitian**

Terkait dengan penelitian penulis yang berjudul, *Implementasi ASEAN Framework of Action On Marine Debris Terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Laut di Kawasan Asia Tenggara* penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya memiliki kesamaan namun berfokus pada sampah laut.

Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu, dimana yang pertama oleh Muhammad Reza Cordova dalam karyanya yang berjudul “*Inisiasi data sampah laut Indonesia untuk melengkapi rencana aksi nasional pembuangan sampah laut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2018*”. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan pencemaran sampah laut berkelanjutan yang dapat digunakan untuk mengelola dan menangan pencemaran sampah laut di Indonesia. Konsep triple helix digunakan untuk pengelolaan, termasuk pengelolaan dan pembuangan sampah laut. Persamaan penelitian Muhammad Reza Cordova dan penulis adalah menjelaskan bagaimana penanganan sampah plastic di laut. Muhammad Reza Cordova menggunakan metode *triple helix* sedangkan penulis menggunakan konsep *kerja sama internasional*

Selanjutnya, peneliti menemukan referensi dari buku Buku yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN 2021 yang berjudul “*Rencana Aksi Regional ASEAN*

*Untuk Memerangi Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN (2021-2025)”.*

Perbedaan penelitian Muhammad Reza Cordova berfokus pada data sampah laut di Indonesia sedangkan Buku yang diterbitkan oleh sekretariat ASEAN membahas tentang rencana aksi untuk memerangi sampah laut di ASEAN. Penelitian ini berfokus pada rencana aksi regional untuk memerangi sampah laut akan memainkan peran penting dalam membantu ASEAN mengubah arus dalam pertempuran dengan sampah plastik dan melindungi lingkungan laut penting yang menopang kawasan ini untuk generasi mendatang, dari dua hasil penelitian diatas sangat memudahkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang luas mengenai sampah ASEAN.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini, penulis akan mendeskripsikan gambaran umum objek penelitian berupa gambaran umum sampah laut dan gambaran umum ASEAN Framework.

##### **A. Gambaran Umum Sampah Laut**

Sampah merupakan hasil sisa produk atau sesuatu yang dihasilkan dari sisa- sisa penggunaan yang manfaatnya lebih kecil dari produk yang digunakan oleh penggunanya, sehingga hasil dari sisa ini dibuang atau tidak digunakan kembali (Widawati 2014). Sampah yang berserakan secara langsung akan mempengaruhi kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar, Sampah yang masuk ke laut terbawa arus laut dan bergerak mengikuti arah arus laut yang disebut sampah laut. Sampah laut adalah sisa produk yang ditinggalkan atau dibuang ke laut secara sengaja atau tidak sengaja oleh manusia, serta sampah berbagai ukuran yang terdapat di air laut. pendarahan, saluran pernapasan dan pencernaan, penyumbatan jalan, dan bahkan menyebabkan kematian biota laut (Muti'ah 2019).

Jika sampah laut terus meningkat, maka akan berdampak negatif terhadap rantai makanan, ekonomi dan kesehatan masyarakat di wilayah pesisir.

Menurut Stevenson (2011) sampah laut mempengaruhi kehidupan melalui 5 mekanisme, yaitu:

1. Melalui sistem pencernaan dan biota yang terperangkap.
2. Terakumulasi dan akan menyebar ke area lain, beracun, *bioavailability*, dan memiliki efek melalui rantai makanan
3. Sebagai vector untuk spesies invasive

4. Akan berdampak pada habitat dan kehidupan dasar laut
5. Dampak ekonomi.

Selain mencemari air pantai dan biota yang ada di perairan pantai, dari segi ekonomisampah laut juga mengakibatkan sepiunya wisatawan yang berkunjung ke pantai. Daya tarik dan pesona dari pantai hilang akibat banyaknya sampah laut dan mengundang bau yang tidak sedap. Jika tidak di tangani secara dini maka pesona laut akan mati dan tidak adanya daya tarik bagi wisatawan.

Dampak sampah laut begitu parah sehingga Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan resolusi tentang sampah plastik laut di Nairobi, Kenya, pada Desember 2017. Negara-negara harus secara signifikan mencegah dan mengurangi polusi laut pada tahun 2025. Selain itu, 143 negara peserta Our Ocean Conference (OOC), yang diadakan di Nusa Dua, Bali, Indonesia pada 29-30 Oktober 2018, berkomitmen untuk membersihkan lautan dan samudera dari segala jenis sampah plastik dan polusi dari dalam diri masing-masing negara. Kontaminasi dari sumber polusi lain.

Dapat digunakan sebagai pedoman dan strategi menyeluruh untuk perencanaan sektor kelautan di berbagai kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan kegiatan usaha besar, menengah dan kecil, akademisi, LSM, dan masyarakat luas. Kebijakan maritim Indonesia terdiri dari pilar-pilar strategis sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Pertahanan, keamanan, penegakan hukum, dan keamanan maritim.

3. Tata kelola kelembagaan.
4. Peningkatan ekonomi kelautan, infrastruktur kelautan dan kesejahteraan.
5. Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.

Pada sebagian besar proyek di atas, kelestarian lingkungan merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan. Pentingnya kelestarian lingkungan bahkan menjadi salah satu pilar strategi nasional itu sendiri, yaitu penataan ruang laut dan konservasi laut. Pilar Strategi Konservasi Laut bertujuan untuk melindungi sumber daya laut dan mencegah pencemaran laut atau degradasi lingkungan.

## **B. Gambaran ASEAN Framework**

### **1. Sampah laut Asia Tenggara**

Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut merupakan isu lintas batas yang membutuhkan kerjasama regional yang terintegrasi. Selain tindakan nasional yang kuat untuk mengatasi sampah laut, strategi kerja sama yang kuat sangat penting untuk kawasan ASEAN. Tanpa tindakan segera, pencemaran sampah laut dapat berdampak negatif terhadap keanekaragaman hayati laut, lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Negara-negara Anggota ASEAN menyadari kebutuhan mendesak untuk mengambil tindakan dan telah membuat kemajuan penting dalam memerangi sampah laut. Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut dikembangkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Konferensi ASEAN tentang Pengurangan Sampah Laut di Kawasan ASEAN.

### **2. Sejarah Pembentukan Kebijakan**

ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah perhimpunan Kawasan negara-negara asia tenggara. Organisasi ini dibentuk di Bangkok, Thailand Pada 8 Agustus 1967. Adapun pendiri Asean adalah Indonesia, Malaysia,

Filipina, Thailand, dan Singapura.

Hingga saat ini ada 10 negara anggota ASEAN. Selain Negara yang mendirikan ASEAN, Adapun negara lain Brunei Darussalam ( 8 Januari 1984 ), Vietnam ( 28 Juli 1995 ), Laos ( 23 July 1997), Myanmar (23 Juli 1997), dan Kamboja ( 30 April 1999).

Adapun bagaimana kebijakan tentang masalah sampah laut dimulai pada Konferensi Regional ASEAN tentang Pengurangan Sampah Laut di Poceel, Thailand, pada 22-23 November 2017. Pada pertemuan ini, beberapa studi membahas kondisi terkini pencemaran sampah laut di ASEAN; bertukar informasi tentang kebijakan nasional, inisiatif dan praktik terbaik yang ada; mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan; dan mendiskusikan solusi.

Konferensi ini mempertemukan berbagai perwakilan dari Negara Anggota ASEAN, mitra pembangunan, sector swasta dan akademisi. Selanjutnya, Para peserta menyepakati Langkah-langkah yang diatas untuk menangani sampah laut mulai dari dukungan kebijakan dan penguatannya, peningkatan kapasitas, Pendidikan, penelitian dan inovasi, keterlibatan sektor swasta sebagai produsen penghasil sampah, kesadaran dan sosialisasi publik.

Adapun masalah ini dinyatakan pada pemimpin KTT Asia Timur tentang memerangi sampah laut yang dirilis pada November 2018 dan inisiatif aksi kooperatif sampah laut asean+3 juga diluncurkan pada November 2018.

Inisiatif pengetahuan regional asean untuk sampah laut sebagai pusat data dikelola oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan the Regional Capacity Center for Clean seas (RC3S) yang dikelola oleh Indonesia.

Adapun proyek Regional yang berjalan seperti proyek kerja sama ASEAN-Norwegia tentang peningkatan kapasitas local untuk proyek pengurangan polusi plastic di Kawasan ASEAN (ASEAN), yang dimulai pada tahun 2019.

Negara-negara anggota ASEAN sendiri telah mengembangkan strategi kebijakan nasional dan langkah-langkah rencana aksi nasional untuk mengatasi sampah laut dan sampah plastik, yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 pada Juni 2019 melalui Deklarasi Bangkok tentang Penghapusan Sampah Laut di Kawasan ASEAN dan Kerangka Kerja ASEAN untuk Aksi Sampah Laut. Upaya ini menunjukkan tindakan praktis ASEAN dalam perlindungan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, rencana aksi regional ASEAN untuk memerangi sampah laut dikembangkan mulai dari oktober 2019 hingga juli 2020 melalui konsultasi ekstensif dengan para ahli pemangku kebijakan kepentingan terkait. Rencana aksi regional ini dipimpin oleh Thailand dan dengan dukungan Bank Dunia yang mengusulkan bagaimana implementasi aksi regional dalam mengatasi masalah pencemaran plastik laut di ASEAN selama lima tahun kedepan (2021-2025).

### **3. Rancangan Menjalankan Kebijakan ASEAN Marine Debris**

Berawal dari tujuan deklarasi Bangkok, rancangan aksi tingkat regional asean initelah melalui konsultasi pemangku kebijakan yang berawal sejak oktober 2019. Untuk memprioritaskan dan mengidentifikasi apa saja tindakan rencana aksi regional ASEAN ini. Adapun tiga workshop yang dilakukan dengan mitra pembangunan, pakar sektor wisata, akademisi terkemuka dan pejabat pemerintah terkait dari ASEAN MemberState(AMS), ASEAN Working Group on Coastal and

Marine Environment (AWGCME), ASEAN Working Group on Chemicals and Waste (AWGCW), ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities (AWGESC). Adapun beberapa workshop yang telah terlaksana dan dilakukan sebagai berikut:

1. Workshop 1 (Bangkok, Thailand) 29-30 Oktober 2019

Pada workshop pertama ini awalnya mengidentifikasi apa saja bidang yang di prioritaskan dari kerangka aksi yang menurut perwakilan negara anggota ASEAN sangat penting untuk menjadi bagian ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris.

2. Workshop 2 (Singapura) 21-22 Januari 2020

Pada workshop kedua memungkinkan diskusi perwakilan negara anggota ASEAN mengenai tindakan kolaboratif potensial dengan sektor swasta dan asosiasi industri. Bidang utama yang dibahas termasuk investasi, standar dan pelabelan produk, dan pengadaan ramah lingkungan. Diskusi ini menghasilkan aksi regional yang potensial untuk mendukung komponen keempat dari kerangka aksi keterlibatan sektor swasta.

3. Workshop 3 (Virtual) 26 Maret 2020

Workshop ketiga dilaksanakan melalui virtual dan melibatkan presentasi dari mitra pembangunan utama, pakar sektor swasta, dan pejabat pemerintah tentang inovasi, metodologi metrik, pengembangan kapasitas, perubahan perilaku, dan kesadaran publik. Diskusi berikutnya, termasuk survey tindak lanjut ke negara anggota ASEAN, mengidentifikasi tindakan regional yang potensial terkait dengan komponen kedua dan ketiga dari kerangka aksi

penelitian, inovasi dan pengembangan kapasitas serta kesadaran public, Pendidikan dan penjangkauan. Konsultasi mengenai rancangan daftar tindakan yang dihasilkan telah dilakukan dengan para ahli materi pelajaran yang relevan dari mitrapembangunan dan juga asosiasi industri yang berbasis di ASEAN. Dua pertemuan konsultasi diadakan pada tanggal 9 dan 13 Juli 2020. Umpan balik dari para ahli telah dimasukkan ke dalam laporan ini jika relevan, atau dicatat untuk dipertimbangkan selampelaksanaan tindakan di masa mendatang. Rancangan aksi regional yang telah dikonsultasi dan didukung oleh badan-badan sectoral terkait, disahkan ad-referendum oleh ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME) pada 17Februari 2021, oleh ASEAN pada 8 Maret 2021, dan selanjutnya diadopsi ad-referendum oleh pertemuan tingkat Menteri ASEAN tentang Lingkungan Hidup (AMME) pada Mei 2021.

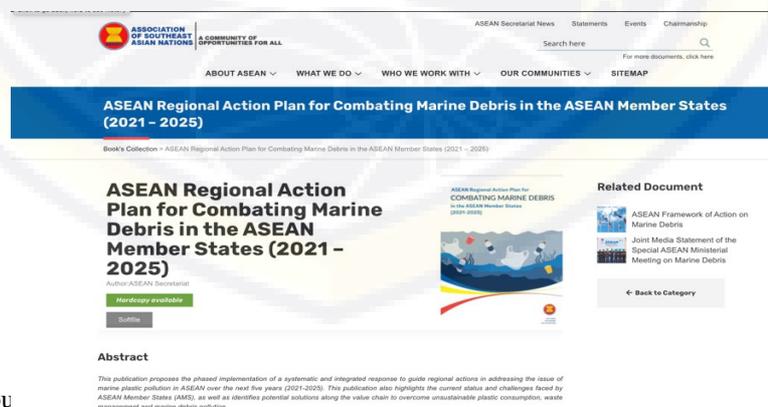
## BAB IV

### ANALISIS PEMBAHASAN

Implementasi ASEAN Framework of action on marine debris adalah kebijakan yang dilakukan ASEAN terhadap negara-negara Kawasan Asia tenggara dalam menangani sampah laut. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana model implementasi kebijakan dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya, berikut penjeleasan mengenai apakah upaya dan implementasi yang dilakukan oleh ASEAN dan negara-negara anggotanya berhasil atau tidak, maka penulis memberikan hasil sebagai berikut:

#### A. Implementasi ASEAN Dalam Menjalankan Frame Work

Hasil penelitian penulis menemukan bahwa implementasi ASEAN framework marine debris tentang sampah laut yaitu masih berupa upaya-upaya yang dilakukan ASEAN dan negara anggotanya dengan menggunakan internet, berupa website yang dipublikasikan secara luas apa saja aksi regional yang akan dilakukan kedepannya.



Gambar 1. “ bu

ASEAN

Member State (2021-2025) “

Dimana pada website ini ASEAN mengeluarkan kebijakan regional yang

dipublikasikan, salah satu isi dari rancangan ini adalah untuk mengenalkan kepada publik apa saja tindakan dan upaya yang dilakukan ASEAN. Laporan ini dapat dilihat disitus resmi ASEAN.

Dalam Hasil analisis penulis, penulis akan menjelaskan bagaimana situasi atau kondisi rancangan kebijakan ASEAN dalam menangani sampah global secara regional dan nasional diantaranya adalah:

a. Di Level Regional

Hasil analisis penulis menyatakan bahwa, bentuk dari upaya dalam menangani sampah laut ini berupa Regional Action Plan. Yang dimana dalam menjalankan upaya kebijakan ASEAN framework ini adalah dengan melakukan perundingan secara terus menerus dilakukan dengan kehati-hatian, sehingga menghasilkan dokumen kerangka kerja, berupa Regional Action Plan, meskipun banyak yang tidak di harapkan dalam dokumen tersebut, karena bukan instrumen yang mengikat secara hukum, melainkan lebih banyak membahas yang umum ke khusus. Oleh karena itu, negara-negara lain di luar ASEAN mengharapkan hasil positif dari dokumen kerangka kerja ini, dikarenakan keempat negara di kawasan ASEAN adalah salah satu pencemar laut yang paling signifikan secara global.

Adapun strategi KTT ASEAN KE-34 yang diadakan di Thailand pada juni 2019 mengeluarkan dua dokumen tentang perlindungan laut di Asia Tenggara, yaitu tentang Deklarasi Bangkok melawan sampah laut dan kerangka Aksi ASEAN atau disebut Regional Action Plan. RAP ini memiliki peran besar, dimana memperkuat hubungan multilateral antar negara-negara Anggota ASEAN dan mengurangi secara signifikan sampah laut dan darat. Dari kawasan ASEAN juga memasukkan tujuan

pendirian pusat penanggulangan sampah laut kerangka aksi yang cenderung berperan sebagai institusi penting di kawasan ASEAN. Pusat tersebut dapat berfungsi sebagai dokumentasi bagi negara anggota ASEAN, Sebuah organisasi yang mendukung kolaborasi dan koordinasi bagi berbagai program sampah laut.

Sehingga penulis dapat melihat, bahwa kekurangan dari RAP ini yaitu, Negara anggota ASEAN tidak waspada dalam memerangi masalah lingkungan ini, karena kurangnya komitmen untuk melegalkannya secara hukum untuk melestarikan lingkungan. Yang dimana, Salah satu contohnya adalah bagaimana asap lintas batas yang terjadi di Indonesia, ASEAN mengeluarkan kebijakan tetapi tidak terikat secara hukum. Hal ini masih menghasikan masalah di tengah masyarakat ASEAN itu sendiri.

b. Di Level Nasional

1) Indonesia

Dalam menanggapi permasalahan sampah plastik laut, pemerintah indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan presiden tentang sampah laut yaitu nomor 83 tahun 2018, yang ditargetkan dapat berkurang 70 persen pada tahun 2025. Namun kebijakan ini perlu dikritisi karena buruknya penanganan sampah laut di Indonesia. Mulai dari tidak adanya akses yang transparan kepada umum, Belum ada mekanisme pendanaan yang jelas untuk mengatasi sampah laut, Belum ada upaya kebijakan partisipatif, melibatkan masyarakat adat, dan kebijakan daerah bagaimana mengatasi sampah laut di Indonesia.

Penulis juga mendapatkan apa saja upaya turunan dari RAP yang dilakukan di Indonesia secara nasional. Upaya ini terdiri lima pilar utama, dijelaskan sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Perubahan perilaku

Kesadaran dari berbagai pihak sangat penting untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan sampah plastik laut yang produktif dan efektif. Banyaknya pemangku kepentingan di semua daerah melakukan representasi dan dari partisipasi actor NGO sekaligus mencerminkan mengatasi masalah Bersama. Kementerian kelautan dan perikanan (KLHK) saat ini sudah menginisiasi apa saja kebijakan yang bisa mengikut sertakan pemangku kepentingan NGO dan kemitraan pemerintah terkait upaya Rencana Aksi Nasional.

2. Mengurangi Kebocoran di Daratan

Sampah Produk yang mengandung plastik atau bahan non organik yang berasal dari jalan-jalan kota atau hujan, yang mengalir ke laut. Ini memiliki efek yang merusak lingkungan bagi kehidupan laut dan ekosistem yang ada dilaut.

3. Mengurangi Kebocoran Berbasis

Sampah laut bisa berasal dari banyak tempat, seperti pesisir dan kapal laut. Kemitraan bilateral dan regional ini sangat penting dimana bertujuan untuk mengatasi mengendalikan sumber sampah laut. Upaya ini dilakukan untuk memantau dan mengumpulkan sampah plastik dari laut menggunakan teknologi yang relevan untuk mendapatkan hasil.

4. Mengurangi Produksi dan Penggunaan Plastik

Dalam melaksanakan program ini adanya kendala, dimana tidak semua produsen plastik dan produk sejenis aktif dalam pengelolaan sampah laut.

5. Meningkatkan Mekanisme Pembiayaan Reformasi Kebijakan dan Implementasi

Sumber pendanaan berasal dari APBD dan APBD. Pendanaan strategis dari organisasi internasional dan negara mitra diharapkan dapat mendanai upaya mitigasi sampah laut.

2) Malaysia

Malaysia adalah penghasil produksi industri plastik terbesar di ASEAN, dengan lebih 1300 Produsen dan Nilai ekspor RM30 Miliar pada 2016, yang dimana berpotensi menghasilkan 0,94 juta ton sampah plastik yang tidak diolah dan 0,14-0,37 juta ton dibuang dilautan. Sebagai respon mengatasi sampah laut Malaysia juga mengeluarkan Roadmap dimana ini berguna sebagai pedoman holistic dan plastik nol di Malaysia. Dimana tujuan ini adalah untuk mengikuti strategi yang berjalan, berbasis bukti dan komprehensif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan kolektif emisi sekali pakai di Malaysia, upaya rancangan aksi ini bertujuan melakukan Langkah-langkah menuju rute yang lebih Makmur untuk lingkungan dan lebih baik pada tahun 2030.

Penulis juga menemukan upaya rancangan aksi regional yang dilakukan Malaysia yaitu:

1. Membentuk Kelompok respons cepat untuk segera meluncurkan praktik terbaik seiring dengan berkembangnya teknologi dan teknik

baru.

2. Fungsi komunikasi untuk memastikan pesan publik disaring dengan benar.
3. Mempertahankan pengawasan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan utama.
4. Kemajuan pemantauan dan meninjau kemanjuran tindakan.

Pemerintah Malaysia dalam melakukan upaya rancangan aksi regionalnya masih melakukan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat untuk upaya lingkungan yang lebih baik.

### 3) Singapura

Pada Juni 2022, Singapura mengeluarkan apa saja upaya yang akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah sampah laut. Untuk mengatasi masalah ini membutuhkan berbagai upaya kolektif dan komprehensif. Maka dari itu pemerintah memprioritaskan enam rancangan aksi nasional yang telah dibuat. Upaya yang dilakukan adalah sebuah kebijakan yang mana antara lain:

#### 1. Pengurangan Sumber sampah berbasis lahan

Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA), melalui Undang-undang Kesehatan masyarakat lingkungan, pemerintah singapura membuat sistem pengumpulan dan pengelolaan yang komprehensif dan terintegritasi untuk mencegah kebocoran sampah laut. Sementara Public Utilities Board (PUB) berencana semakin mengurangi mikroplastik yang tersebar dilaut melalui sistem teknologi membran bioreactor pada instalasi reklamasi air.

#### 2. Pengurangan sumber sampah berbasis dilaut

Kegiatan yang dilakukan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang dibuat tentang sampah dilaut dimana penerapannya menghasilkan pencegahan polusi sampah laut.

### 3. Pendekatan Ekonomi Sirkular

Upaya ini dibuat oleh the Zero Waste Masterplan, yang dimana menghasilkan kampanye "Say YES to Waste Less", yang menyerukan kepada warga untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mendorong warga mendaur ulang lebih banyak plastik sekali pakai yang telah digunakan.

4. Penelitian dan Pengembangan Dari 2016-2020, National Parks Board (NParks) dan National University of Singapore (NUS) telah melakukan proyek penelitian yang bertujuan membangun data dasar tentang sampah laut di pantai singapura. Data yang dihasilkan nantinya akan dimasukkan dalam program pemantauan nasional dimasa mendatang.

5. Mempromosikan dan Memperketat Jangkauan dan Keterlibatan Pemerintah  
Dibawah naungan Zero Waste Master plan, mengusulkan untuk perubahan desain untuk tempat sampah daur ulang dan skema pengembalian wadah minuman.

### 6. Keterlibatan dan Kolaborasi Internasional

Secara Internasional, Singapura telah melakukan upaya dalam pertemuan Ad-Hoc Open Ended Expert Group (AHEG) dan diskusi untuk mengembangkan instrument internasional yang mengikat secara hukum tentang polusi plastik. Secara Regional, Singapura Bersama dengan Negara

Anggota ASEAN lainnya mengadopsi Deklarasi Bangkok tentang pemberantasan sampah laut dan rancangan aksi regional.

#### 4) Vietnam

Vietnam adalah salah satu dari lima negara teratas di dunia yang menghasilkan sampah laut paling banyak, menangani sekitar 280-0,73 juta ton sampah plastik setiap tahun. Dipimpin oleh Kementerian Sumber Daya Alam, pemerintah merilis upaya rencana aksi nasional, Aksi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut 2030, sebagai wujud komitmen politik. Penulis mendapatkan data bahwa rencana aksi yang dilakukan pemerintah, ingin mencapai target dan tujuan untuk mengurangi sampah laut sebesar 50 persen pada 2025. dengan mengabaikan, kehilangan, atau membuang alat tangkap dan mencegah penggunaan kantong plastik yang tidak dapat terurai hingga 80% di kawasan pantai, Pusat Perbelanjaan, akomodasi, dan layanan lainnya. Selain itu, ini juga bertujuan untuk memastikan kampanye pembersihan pantai nasional diluncurkan setidaknya dua kali.

Vietnam juga telah mengeluarkan upayanya yang dimana menghasilkan 5 pilar utama yaitu:

1. Mengedukasi dan perilaku masyarakat tentang sampah laut.
2. Mengumpulkan, menyimpan, memindahkan, dan mengelola sampah yang berasal dari pesisir dan laut.
3. Mengendalikan sumber produksi yang mencemarkan laut.
4. Melakukan Kerjasama internasional, penelitian ilmiah, dan melakukan pengembangan teknologi sampah laut.

5. Melakukan investigasi, survey, review, dan penelitian dan perumusan mekanisme yang secara konsisten dan efektif dilakukan untuk sampah laut.

Adapun temuan penulis bahwa upaya ini belum bisa menghasilkan hasil yang konkrit karena baru berjalan satu tahun. Oleh karena itu terlalu dini untuk melihat hasil yang telah dikerjakan.

#### 5) Filipina

Filipina adalah negara dengan tingkat penghasil plastik ke tiga tertinggi di dunia. Dengan perkiraan 0,28-0,75 metrik ton pertahun. Dalam rangka memerangi sampah laut Filipina bekerjasama dengan United Nation Development Project (UNDP) dalam rangka menyusun strategi nasionalnya.

Pemerintah Filipina telah merancang program apa saja yang mampu mengurangi sampah laut. Dimana penulis menemukan bahwa program ini bekerjasama dengan United Nation Development Project dalam menyiapkan program pengurangan sampah laut yang terukur dan dapat dipublikasi secara global. Dari upaya ini pemerintah Filipina telah mengeluarkan aturan untuk mengalokasikan pembiayaan untuk mengurangi sampah laut. Akan tetapi hal ini belum spesifik karena masih mengutamakan pengelolaan sampah domestik. Adapun upaya rencana aksi yang dilakukan adalah mengupayakan regulasi berbasis ekonomi, menerapkan biaya ekstra dan pajak lingkungan untuk mengatasi sampah laut, mengoptimalkan kampanye media sosial tentang pelestarian lingkungan laut.

#### 6) Thailand

Thailand adalah negara keenam paling tercemar di dunia saat ini, dengan

total 2,33 juta ton sampah domestiknya dimana ini berdampak pada laut. Negara Thailand juga termasuk negara yang konsumsi plastik terbesar di ASIA yang mana di perkirakan penggunaan konsumsi perorang mencapai 40 kilogram pertahun.

Penulis juga mendapatkan bahwa kementerian sumber daya dan lingkungan Hidup Thailand telah mengeluarkan upaya kebijakan rancangan aksi yaitu Thailand melakukan kampanye yang diharapkan mendapat perhatian masyarakat dalam menanggulangi sampah laut. Pemerintah Thailand sendiri mengadopsi tiga upaya tahap rencana Aksi regional antara lain:

- a. Deklarasi bangkok yaitu Bangkok menuju pencegahan polusi sampah plastik laut, memerangi sampah laut kawasan ASEAN, dan mengembangkan sistem daur ulang.
- b. Thailand juga akan menghentikan penggunaan plastik kurang dari 36 mikron, wadah makanan styrofoam, gelas plastik kurang dari 100 mikron, dan sedotan plastik tahun 2022.
- c. Thailand menargetkan 100 persen sampah plastik yang telah didapat dilaut atau pun pesisir akan didaur ulang.

Dari aksi regional ini penulis mendapatkan bahwa rancangan aksi nasional Thailand ini masih bersifat kebijakan. Karena sifatnya masih baru dan perlu di lakukan arahan dari pemerintah dan riset untuk pemantauan apa saja kebijakan yang telah berjalan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa ASEAN dalam merencanakan dan menjalankan Regional Action Plan (RAP) telah sesuai prosedur yang dilakukan terbukti adanya beberapa workshop yang diadakan sampai muncul draft final yang telah keluar pada 28 Mei 2021. Hingga menghasilkan kebijakan yang bisa diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN.

Akan tetapi melalui upayanya, adanya beberapa kendala mulai dari penerapan di setiap negara melalui hambatan sendiri mulai dari belum jelasnya bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dan struktur dari kelembagaan untuk mengatasi sampah laut ini masih belum pasti. Karena kebijakan ini masih tergolong baru oleh negara kawasan Asia Tenggara. Adapun masalah dari ini Rancangan Regional ini adalah Kebijakan ini tidak berbadan hukum, hanya berupa usulan Draft yang dapat jadi acuan Negara anggota ASEAN itu sendiri. Yang dimana hal ini dapat menjadikan negara tidak serius dalam menangani masalah global ini.

#### **B. SARAN**

Disarankan untuk penelitian selanjutnya lebih ditujukan kepada wawancara langsung oleh regional organisasi ASEAN dan kedutaan besar negara anggotanya agar bisa mencapai keinginan keilmuan yang terbaru. Dan untuk mengetahui lebih pasti apa-apa saja Langkah tiap negara dalam mensukseskan RAP sampah Laut di kawasan ASEAN.

## DAFTAR PUSTAKA

ASEAN, Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region, (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2019).

Community relations division (crd) sekretariat ASEAN, (2021), "ASEAN Regional Framework on Protection, gender, and Inclusion in Disaster Management.

Dimas, Ahmad. (2019) "Strategi Pemerintah Menanggulangi Sampah Pencemaran Sampah. Skripsi. Universitas Airlangga.

Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (2017). *Contending Theories of International Relation: A Comprehensive Survey* (4th Edition ed). New York: Es Addison Wesley Logman.

Febryani, Sabarita, (2020), *Kerjasama Daerah Asia Tenggara Mengatasi Sampah Plastik Laut*. Universitas Lampung.

FY, Prabawa, dkk, (2021). *Strategi On Marine Debris Reduction In Indonesia: A Review and Recommendation*. Iop Publishing

James E. Dougherty dan Robert L. Plaltze graff, jr. (2017). *Contending Theories Of International Relations: A Comprehensive Survey*. New York: Logman, hal. 419:3

Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2021. *Direktorat Pemndayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*. Kkp.go.id diakses pada 13 Desember 2021.

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

Marves. 2022. *Indonesia Targetkan Kurangi Sampah Plastik Hingga 70 persen Pada Tahun2025*. Jakarta

Muti'ah, Aisyi, Alivia Nadatul, Arju, dan Bambang Edi Purnomo. 2018. "Bahan

AjarMenulis Teks Prosedur Berbasis Kitab Safinatun Najah di Lingkungan Pesantren”. RETORIKA. 11(2): 108-118. Diakses pada 15 Maret 2019 (<https://ojs.unm.ac.id/retorika/article/view/6213>).

Oceans and Human Health: A Rising Tide of Challenges and Opportunities for Europe. *Marine Environmental Research*. Volume 99.

Prabawa, dkk, (2021), Strategy on marine debris reduction in Indonesia : a review and recommendation, International Conference on Maritime Sciences and advancedTechnology.

Pricilia, Gaby, Angelicia (2022), “Identifikasi sampah laut (*Marine Debris*) pada kawasanpantai di pulau kodingareng lombo kota Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar.

Rizky, Wulandari. (2021) “Analisis Implementasi Kebijakan Politik Pemerintah IndonesiaDalam Mengantisipasi Sampah Plastik. Skripsi. Universitas Islam Negeri.

Sapto, Hermawan, Wida, Astuti. 2021. *Analysing Several ASEAN CountriesPolicy For Combating Marine Plastic Litter*. Universitas Indonesia.

Stevenson, W. J. (2011) *Operation Management Elevent Edition*. New York: McGraw-HillCompanies, Inc.

Summary. (2021). Asean Regional Action Plan For Combating Marine Debris in The AseanMember States (2021-2025).

UNDP. (2021). Global Opportunities for Long-term Development of Artisanal and SmallScale Gold Mining (ASGM).Jakarta : United Nations Development Programme.

Vika, Azkiya, Dini. 2020. *Bobot Sampah di Laut Indonesia Berdasarkan Jenisnya*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/18/ada-berapa-banyak-sampah-di-laut-indonesia>.

Widawati, Enny dkk. 2014. *Kajian Potensi Pengelolaan Sampah (studi kasus: KampungBanjarsari)*. Jurnal Metris, ISSN: 1441-3287.

World Bank. *What a Waste a Global Review of Solid Waste Management*. 2012.

Xanthos, D. and Walker, T. R. (2017) „International policies to reduce plastic marine pollution from single-use plastics ( plastic bags and microbeads ): A review“, *Marine Pollution Bulletin*. Elsevier Ltd, 118(1–2), pp. 17–26. doi: 10.1016/j.marpolbul.2017.02.048.

Yar, Johan, dkk, (2020), “Analisis sampah laut (*Marine Debris*) di pantai kualo kota Bengkulu, Universitas Bengkulu.